

SPRITUALISASI DAN KONFIGURASI PENDIDIKAN KARAKTER BERPARADIGMA KEBANGSAAN DALAM KURIKULUM 2013

Mukhibat

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo
(mukhibat@yahoo.co.id)

Abstrak

Orientasi pendidikan yang menekankan IQ menjadikan manusia dilanda krisis kemanusiaan. Keadaan demikian manusia semakin membutuhkan spiritualitas sebagai solusi terhadap krisis kehidupan tersebut. Kajian ini dengan analitis kritis ingin mengungkap bagaimana kedudukan moral spiritual yang mendasari semua Kompetensi Inti (KI) Kurikulum 2013 untuk semua Mapel di semua jenjang pendidikan. Spiritualisasi sebagai upaya membangun karakter bangsa dalam Kurikulum 2013 dapat dilihat dalam KI yang saling terkait yaitu spiritual (KI 1), sosial (KI 2), pengetahuan (KI 3), dan keterampilan (KI 4). Adapun sumber nilai moral spiritual dalam pendidikan karakter adalah dari semua agama yang ada di Indonesia, yakni nilai-nilai universal yang secara eksplisit merujuk pada konsep kesatuan penciptaan.

The orientation of education that over-relies on IQ makes human encountered by humanitarian crises. Such circumstance requires human to have adequate spirituality as a solution to overcome the crisis. With a critical analysis, this study aims to uncovering how the spiritual moral underlay all "Core Competencies" (Kompetensi Inti) in the 2013 Curriculum for all subjects at all levels of education. Spirituality as an effort to build the national character in the 2013 Curriculum can be seen at KI which interrelated each other including: spiritual (KI 1), social (KI 2), knowledge (KI 3), and skills (KI 4). Ultimately, the source of spiritual and moral values in education is the character from all of religions in Indonesia, which is the universal value that explicitly refers to the concept of the unity of human creation.

Kata Kunci: Spiritualisasi, pendidikan, karakter, kurikulum 2013

A. Pendahuluan

Perkembangan peradaban suatu bangsa selalu terkait dengan kondisi pendidikan yang berkembang pada masanya, semakin baik pendidikannya semakin baik pula perkembangan peradabannya.¹ Oleh karena itu, mestinya kemajuan pendidikan Islam di suatu negara akan mendorong kemajuan peradaban Islam di negara tersebut. Namun jika mengamati Indonesia sebagai negara berkembang yang tradisi pendidikan Islamnya cukup kuat ternyata peradabannya masih tertinggal dengan negara-negara lain. Mengapa demikian, menurut Samani salah satu penyebabnya adalah karena kurang berhasil dalam pendidikan moral, karakter dan spritual,² dalam perspektif ilmu pendidikan Islam identik dengan pendidikan akhlak.³

Sekarang ini muncul kecenderungan kuat, melalui budaya yang menanggalkan dan menelanjangi nilai-nilai moral yang dikemas dengan model pembusukan nilai (*value decay*) yang menjebak dan menjerumuskan generasi bangsa menjadi korban budaya yang bercorak revolutif, hedonistik, serba instan, namun gagal menempatkan moral, etika, dan agama dalam perubahan itu sebagai pondasinya. Selaian itu, manusia berusaha mematahkan mitos kesakralan alam raya yang oleh doktrin-doktrin agama, kini hanya difahami semata-mata sebagai benda otonom yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan.⁴ Yang terjadi di tengah masyarakat adalah pendidikan agama, moral, etika, makin tidak memperlihatkan daya guna, seperti tidak ada saja yang melekat di hati generasi yang telah melewati

¹Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan suatu bangsa misalnya di Yunani, Romawi, Bizantium, Islam di Baghdad-Spanyol pada zaman klasik, Islam di Turki, Persia, Amerika dan bebarapa negara di Eropa menunjukkan adanya korelasi positif antara peradaban dan pendidikan. Baca, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, *Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia* (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI: 2010), h.3

² Pendidikan Karakter merupakan salah satu faktor yang mendukung kemajuan pembangunan bangsa, lihat, Muchlas Samani, Hariyanto, *Konsep & Model Pendidikan Karakter* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 36.

³ Ahmad Salim, *Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah* (Yogyakarta: Sabda Media, 2013), h. 86. Baca juga, M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa* (Surakarta: UNS Press, 2010), h. 22.

⁴ Komaruddin Hidayat, *Agama dan Kegagalan Masyarakat Modern, dalam Kehampaan Spritual Masyarakat Modern*, Nurcholish Madjid, (Jakarta: Mediacita, 2000), h. 97. Pada halaman 98 disebutkan pula bahwa, "Modernisme yang berporos pada rasionalitas harus diakui telah mampu mengantarkan manusia pada berbagai prestasi kehidupan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Manusia modern pun semakin merasa yakin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan. Agama yang mendengungkan ajaran-ajaran irasional dipandang sebagai sisa-sisa dari *primitive culture* (budaya primitif)".

pendidikan formal maupun nonformal. Lebih lanjut Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Sahal Mahfudz menilai bahwa pendidikan (formal) agama gagal, karena belum bisa mempengaruhi sistem etika dan moral peserta didik.⁵ Inilah dampak negatif dari orientasi pendidikan yang tidak menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional serta diperkaya kecerdasan spritual. Akibatnya umat manusia sekarang dilanda krisis kemanusiaan secara terus-menerus karena terbelenggu ke dalam pandangan dunia yang revolutif, hedonistik, instan, dan serba materialistik. Keadaan demikian manusia semakin membutuhkan spritualitas sebagai dasar untuk memberikan jawaban secara lebih komprehensif terhadap krisis kehidupan yang dihadapi. Asumsi dasarnya adalah, manakala berlangsung gerakan dinamis pendayagunaan secara maksimal kapasitas-kapasitas ruhani, maka dengan sendirinya kejujuran, integritas, kepercayaan diri, solidaritas dan toleransi benar-benar mewarnai hubungan antar-manusia. Dengan demikian berarti, peneguhan spritualitas dalam proses edukasi masuk dalam kategori pendidikan karakter. Dan untuk selanjutnya, pandangan hidup spritualistik berfungsi sebagai pilar tegaknya pribadi-pribadi berkarakter.

Namun demikian, ketika spritualitas dinubuhkan sebagai fundamen dasar pengatasan krisis kemanusiaan, pertanyaannya adalah jalan mana musti ditempuh agar spritualitas sungguh-sungguh bersenyawa dengan kehidupan umat manusia? nilai-nilai moral spritual manakah yang ingin dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa Indonesia? sehingga dianggap sebagai nilai moral yang otentik bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia sejak dulu mempunyai nilai agama, nilai budaya, dan nilai Pancasila, secara khusus timbul pertanyaan lain, bagaimana wujud dan susunan kurikulum untuk pendidikan yang melahirkan sosok manusia berkarakter yang kuat, bermoral dan religius dengan jati diri yang jelas dan dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi bangsa, baik masalah masa kini maupun di masa datang. Jawaban pasti terhadap pertanyaan ini berkaitan erat dengan kemampuan dunia pendidikan. Artinya, dunia pendidikan berada dalam satu titik pertarungan yang tidak sederhana. Jika dunia pendidikan gagal meneguhkan pandangan dunia spritualistik, maka hampir dapat dipastikan tidak tersedia kawah candradimuka edukasi spritualitas.

Artikel ini menyuguhkan kajian tentang bagaimana kedudukan sikap moral dan spritualitas dalam wacana pendidikan karakter yang mendasari semua Kompetensi Inti (KI) Kurikulum 2013 untuk semua Mata Pelajaran di

⁵Ade Irma Solihah, *Membentuk Karakter dan Watak Kepribadian*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 66.

semua jenjang pendidikan, yang meliputi: K1: Spritual, K2: Sikap Sosial, K3: Pengetahuan, dan K4: Keterampilan, yang kian ramai dibicarakan. Kajian ini dengan menggunakan *library research* mencoba memberikan jawaban dari persoalan-persoalan tersebut dengan melakukan analisis kritis dan logika reflektif terhadap nilai sikap spritual, dan karakter dalam Kurikulum 2013.

B. Kerangka Ilmu dalam Spritualisasi Pendidikan Menuju Manusia Berkarakter

Mengapa agenda spritualisasi pendidikan dalam Kurikulum 2013 begitu penting bagi pembentukan karakter bangsa sekarang ini? Agenda spritualisasi pendidikan menjadi kerangka paradigma alternatif terhadap dua hal,⁶ *pertama*, gejala sekularisasi, nampaknya semua sepakat bahwa sistem pendidikan di Indonesia menjurus ke arah skularisasi pendidikan. Hal tampak dari sistem dan orientasi belajar peserta didik di sekolah yang sepenuhnya diarahkan untuk mengejar kesuksesan secara fisik dan material, seperti karier, kekuasaan, dan uang. *State of mind* generasi di *set-up* dalam kerangka itu, sehingga *output* generasinya pun menjadi serba materialistik, konsumeristik, dan hedonistik. Jika dilacak secara epistemologis, hal tersebut tidak lepas dari konstruksi filsafat pendidikan yang lebih menitikberatkan pada filsafat antroposentrisme ketimbang teosentrisme.

Kedua, peningkatan jumlah penggunaan narkoba, yaitu sebesar 22,7%, dari 1,1 juta ditahun 2006 menjadi 1,35 juta tahun 2008. Dari 3,6 juta penyalahgunaan narkoba 41 % mencoba di usia 16 sd 18 tahun.⁷ Konflik horisontal, lalu lintas di jalanan tidak tertib, luntarnya etika dan budi pekerti, korupsi, dan semua itu sangat cukup sebagai argumen atas keprihatinan bersama tentang merosotnya budi pekerti, lemahnya kemandirian dan sekaligus hilangnya karakter jati diri bangsa. Hal ini menjadi bukti kurangnya penerapan nilai-nilai spritual dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hampir secara keseluruhan manusia saat ini mengalami kehampaan spritual.

Spritualisasi pendidikan mendasarkan bangunan epistemologinya dalam tiga kerangka ilmu:⁸ *Pertama*, dasar filsafat, jika pendidikan sekuler mendasarkan diri pada filsafat antroposentris, maka spritualisasi pendidikan tentu saja mengedepankan filsafat teosentrisme. Perbedaan titik pijak ini, jelas menimbulkan visi, watak, dan sistem pendidikan yang berbeda. Jika

⁶ Sukidi, *Pendidikan Masyarakat Indonesia Baru*, (Jakarta: Grasindo: 2002), h. 446.

⁷ Badan Nasional Penanggulangan Narkotika tahun 2008

⁸ Sukidi, *Op.Cit.*, h. 448.

konstruksi pendidikan berangkat dari filsafat antroposentrisme, maka ia lebih mendasarkan diri pada pemikiran manusia dalam rangka “sekularisasi pendidikan”-umum versus agama-untuk orientasi duniawi semata. Berbeda halnya dengan spritualisasi pendidikan yang lebih mengedepankan filsafat teosentrisme, maka ia bersandar pada pijakan dan orientasi ketuhanan.

Kedua, tujuan pendidikan. Jika pendidikan sekuler bertujuan untuk membangun kehidupan duniawi semata, maka spritualisasi pendidikan diarahkan untuk membangun kehidupan duniawi melalui pendidikan sebagai wujud pengabdian kepada-Nya. Dalam konteks inilah spritualisasi pendidikan menumbuhkan segi-segi kesadaran kepada peserta didik akan pentingnya “asal dan orientasi akhir” dari perjalanan pendidikan dan kehidupan, sehingga melahirkan *mindset* di kalangan peserta didik yang lebih spritual.

Ketiga, nilai dan orientasi pendidikan. Jika pendidikan sekuler didasarkan pada nilai dan orientasi pengembangan Iptek sebagai nilai dan orientasi ilmu, maka spritualisasi pendidikan juga mengembangkan Iptek dengan segi penambahan pada iman dan taqwa sebagai ruh-spiritual dari pendidikan itu sendiri. Islam memandang bahwa ilmu tidak bebas nilai—sebagaimana yang dikembangkan ilmuan Barat akan tetapi sarat nilai, dalam Islam ilmu dipandang universal dan tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu dalam Islam.⁹ Moral dan nilai-nilai spritual sangat fundamental dalam ikut menentukan arah dan perjalanan bangsa melalui tujuan pendidikannya.

Tiga kerangka ilmu dalam spritualisasi pendidikan di atas pada akhirnya mempunyai implikasi serius terhadap budaya dan karakter di sekolah. Pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk jasmani rohani, makhluk etik religius, dan makhluk individu dan sosial.¹⁰ Spritualisasi dan nilai agama tidak bisa dipisahkan dari pendidikan karakter.¹¹ Karenanya orientasi pendidikan adalah berwawasan semesta, berwawasan kehidupan yang utuh dan multidimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia, dan alam secara integratif.

Lantas, di mana letak spritualisasi pendidikan dalam menumbuhkan karakter peserta didik? Spritualitas merupakan suatu pencarian terhadap sesuatu yang bermakna (*a search for the sacred*).¹² Spritualitas senantiasa

⁹ S.M. Naquib Al Attas, *The Concept OF Education In Islam* (ISTAC: Kualalumpur, ISTAC, 1991), h. 43.

¹⁰ Ahmadi, *Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2013), h. 97.

¹¹ Abdul Majid, Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Persoektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 58.

¹² C.R., Synder, Shane J. Lopez, *Handbook of Positive Psychology* (Oxford: Oxford University Press, 2005), h. 37.

mengambil titik tolak dari moralitas dan etika agama-agama. Maslahat dan kebajikan dalam perspektif agama atau yang diajarkan oleh agama merupakan rujukan terbentuknya pandangan dunia spritualistik. Semakin spritualistik hayat seorang manusia, maka ia semakin mengukuhkan dirinya sebagai pribadi-pribadi berkarakter. Pada mulanya, ajaran-ajaran agama dalam spektrum moralitas dan etika berkedudukan sebagai referensi bagi terbentuknya pandangan hidup spritualistik yang berfungsi sebagai pilar tegaknya pribadi-pribadi berkarakter. Dengan demikian spritualitas dipahami sebagai pendayagunaan secara maksimal kapasitas-kapasitas ruhani manusia agar lahir atmosfer kehidupan sosial dan personal yang bermutu, maka dengan sendirinya kejujuran, integritas, kepercayaan diri, solidaritas dan toleransi benar-benar mewarnai hubungan antar-manusia. Spritualitas adalah sebuah proses yang mencakup usaha untuk menemukan sesuatu yang bermakna dan mencakup usaha untuk berpegang padanya dan menjaganya.

Dalam konteks pendidikan spritual, pemahaman terhadap ajaran Islam, tidak didekati dengan ritual dan formal belaka, namun lebih ditangkap dimensi semangatnya yang dapat berimplikasi pada perubahan sikap melalui proses internalisasi secara intens.¹³ Spritualisasi pendidikan melalui kecerdasan spritual (*spritual intelligence*), akan memberikan *guide line* kepada guru untuk mengajarkan arti pentingnya pendidikan spritualitas, di mana kecerdasan spritual seperti kejujuran, keadilan, kebajikan, kebersamaan, kesetiakawanan yang diobyektifikasikan ke dalam sistem pendidikan.¹⁴ Pada akhirnya, nilai-nilai spritual tersebut akan diobyektifikasikan dalam bentuk pendidikan moral dan karakter.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menjadi pijakan dan landasan kuat untuk melaksanakan secara operasional pendidikan karakter sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010), hal tersebut bisa dicermati dalam Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁵ Dengan demikian berarti, ada semacam bagan

¹³ Zurqoni & Mukhibat, *Menggali Islam Membumikan Pendidikan, Upaya Membuka Wawasan Keislaman & Pemberdayaan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar Ruzmedia, 2011), h. 40.

¹⁴ Pasiak Taufiq, *Revolusi IQ, EQ, SQ Antara Neurosains- dan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2004), h. 27.

¹⁵ *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2007), h. 2.

hubungan yang bersifat runtu mengalir dari hulu ke hilir. Moralitas dan etika agama berada pada sisi hulu untuk kemudian mencetuskan implikasi positif ke arah terbentuknya spritualitas yang akan melahirkan manusia berkarakter.

C. Pendidikan Karakter

Penggunaan nama karakter tidak akhlak adalah soal pilihan Kemendiknas mungkin secara substantif berbeda atau memiliki maksud yang spesifik. Mungkin agar lebih universal dan diterima banyak kalangan. Seperti yang dilakukan oleh almarhum Harun Nasution dengan mempopulerkan *Teologi* untuk Ilmu Kalam dan *Mistisisme* untuk Taswuf. Dampaknya mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum (PTU) lebih bersemangat dan bergensi mempelajarinya.

Character dalam bahasa Inggris berarti “tabiat”, budi pekerti, watak”. Menurut Marks Rutlan karakter dari bahasa Latin yang berarti “dipahat”.¹⁶ Dalam kamus psikologi *character* adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral.¹⁷ Istilah yang pengertiannya hampir sama dengan karakter, yaitu *personality characteristic* memiliki arti bakat, kemampuan, sifat dan sebagainya yang secara konsisten diperagakan oleh seseorang. Istilah karakter juga merujuk pada ciri khas, perilaku khas seseorang atau kelompok, kekuatan moral, atau reputasi.¹⁸ Karakter secara etimologis menurut Mounier berasal dari bahasa Yunani “kasairo” berarti “cetak biru”, format dasar”, “sidik” seperti sidik jari. Menurutnya dalam pengertian karakter mengandung dua interpretasi, *pertama* karakter adalah *given* atau sesuatu yang sudah dari sananya, *kedua* suatu yang dibentuk melalui proses yang dikehendaki (*willed*).¹⁹ Karakter dalam bahasa Arab diartikan “*khuluq, sajiyyah, thab`u*” artinya budi pekerti, tabiat, atau watak.²⁰ Terkadang diartikan *syakhshiyah*, yang pengertiannya lebih dekat kepada *personality* yang merupakan kumpulan dari berbagai aspek kepribadian.

Secara konseptual, istilah pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan religius, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak mulia, pendidikan moral atau pendidikan nilai.²¹ Dalam kaitannya dengan

¹⁶ Mark Rutlan, *Karakter Itu Penting*, terj. Ly Yen (Jakarta: Light Publishing, 2009), h. 1.

¹⁷ Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Tonis, 1982), h. 29.

¹⁸ Thomas Lickona, *Education for Character Education: how Our School Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam, 1991), h. 5.

¹⁹ Emmanuel Mounier, *The Character of Man* (New York: Harper dan Brathers, 1956), h. 28.

²⁰ M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan Karakter: Membangun Perdaban Bangsa* (Surakarta: UNS Press, 2010), h. 11.

²¹ Samsuri, “Mengapa Perlu Pendidikan Karakter”, *Makalah*, disajikan pada *workshop* tentang Pendidikan Karakter oleh FISE UNY. Yogyakarta tahun

pendidikan akhlak, terlihat bahwa pendidikan karakter mempunyai orientasi yang sama yaitu pembentukan karakter. Perbedaannya, bahwa pendidikan akhlak terkesan timur dan Islam sedangkan pendidikan karakter terkesan Barat dan sekuler, bukan alasan untuk dipertentangkan. Pada kenyataannya keduanya memiliki ruang untuk saling mengisi. Bahkan Lickona sebagai Bapak Pendidikan Karakter di Amerika justru mengisyaratkan keterkaitan erat antara karakter dengan spritualitas.²² Dengan demikian, bila sejauh ini pendidikan karakter telah berhasil dirumuskan oleh para penggiatnya sampai pada tahapan yang sangat operasional meliputi metode, strategi, dan teknik, sedangkan pendidikan akhlak sarat dengan informasi kriteria ideal dan sumber karakter baik, maka memadukan keduanya menjadi suatu tawaran yang sangat inspiratif. Hal ini sekaligus menjadi *entry point* bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan yang kuat dengan nilai-nilai spritualitas dan agama. Untuk itu menurut Nur Syam pendidikan karakter didasarkan pada prinsip religiusitas dan prinsip kebangsaan.²³

Dengan demikian, jika pendidikan karakter dipahami sebuah dimensi dari kinerja lembaga pendidikan, setiap moment pendidikan dapat dijadikan wahana pendidikan nilai yang berguna pertumbuhan karakter peserta didik, di mana setiap mata pelajaran terdapat fungsi pedagogis edukatif dalam konteks pembentukan karakter. Posman dan Weingarther mengatakan bahwa lembaga pendidikan harus dan barangkali satu-satunya lembaga yang mampu merencanakan dan memulai pelaksanaan perubahan dan perbaikan keadaan masyarakat yang keadaan timpang atau kacau karena terjadinya ketidakadilan, dekadensi moral.²⁴ Dari sinilah akan dapat dilihat perbedaan antara Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya. Implementasi Kurikulum 2013 di sekolah memiliki nilai sikap yang sangat bermanfaat untuk membentuk manusia Indonesia pembaharu dengan kepribadian utuh, karena di dalam kurikulum ini mengandung beberapa sikap utama manusia. "Sikap tersebut adalah sipritual, sosial, dan ketrampilan, sehingga hal tersebut akan membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, yang membedakan Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya desain utamanya Kurikulum 2013 adalah menyalarkan standart kelulusan seperti apa yang diinginkan. Dari situ baru

2009. lihat juga Darmiyati Zuchdi, *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5

²²Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 65. Lihat juga, M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan Karakter: Membangun Perdaban Bangsa* h. 11.

²³ Nur Syam, *Pendidikan Karakter Bangsa*, diunduh dari www.Suarakarya-online.com.news.html=258714 pada 3 Maret 2014.

²⁴Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2007), h.28.

ditentukan standart isinya, beda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih dahulu menentukan standart isinya.

D. Spiritualisasi dan Konfigurasi Karakter Berwawasan Kebangsaan

Substansi Kurikulum 2013 adalah pendidikan karakter (*character building*) dan rekonstruksi sosial yang dapat dilihat dari peta kompetensinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 sebagai Kurikulum Karakter (*character curriculum*), karena dalam proses pembelajaran dan metode yang digunakan sampai pada semua perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, media pembelajaran, penilaian, dan bahan ajar) mengandung nilai-nilai karakter. Menurut Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI pendidikan karakter menawarkan kepada peserta didik kedalaman, bukan rupa melainkan isi, bukan ijazah melainkan kompetensi; bukan hanya pintar menguasai konsep, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan *life skills*; bukan mengumpulkan ilmu tetapi pembentukan karakter. Pendidikan tidak cukup sekadar membentuk individu jadi seorang yang cerdas tetapi berakhlak mulia, peduli, mau, dan mampu mengubah tatanan masyarakat yang ada sekarang ini menjadi lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi.²⁵

Berbagai pendapat di berbagai media massa, seminar, dan sarasehan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada awal tahun 2010 menggambarkan adanya kebutuhan masyarakat yang kuat akan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Apalagi jika dikaji, bahwa kebutuhan itu, secara imperatif, adalah sebagai kualitas manusia Indonesia yang dirumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional. Hal inilah salah satu yang mendasari adanya pengembangan Kurikulum 2013 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Di mana titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, beberapa prinsip dasar dalam Kurikulum 2013 adalah: *Pertama*, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. *Kedua*, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. *Ketiga*, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. *Keempat*, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. *Kelima*, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. *Keenam*, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian.

²⁵ *Ibid.*, h. 27.

Adapun spritualisasi pendidikan sebagai upaya membangun karakter bangsa dalam Kurikulum 2013 dapat dilihat dalam kompetensi inti. Kompetensi inti tersebut dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Untuk itu, Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan/spritual (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4).²⁶

Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013 berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organising element*) Kompetensi Dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal Kompetensi Dasar. Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan konten Kompetensi Dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.

Berkaitan dengan optimisme keberhasilan dari suatu kurikulum baru tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai suatu kurikulum baru apakah efektif atau tidak dalam melahirkan generasi yang religius dan berkarakter. *Pertama* mempelajari berbagai implikasi dari segenap keinginan masyarakat itu bagi revisi kurikulum khususnya dan bagi pembaharuan pendidikan pada umumnya. *Kedua*, mempelajari aneka kelemahan dalam kurikulum sekarang, yang dipandang telah turut melahirkan berbagai kekurangan pada bangsa ini. *Ketiga*, mempelajari sumber nilai yang ingin dikembangkan dalam penyusunan kurikulum baru tersebut.²⁷ Berbekal ketiga pertimbangan tersebut

²⁶ Kemendikbud, *Permendikbud No. 69 Tahun 2003 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah* (Jakarta: Kemendikbud: 2013), h. 6.

²⁷ Tonny D. Widiasto, *Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004), h. 293.

di atas, akan mungkin bagi pemerhati maupun praktisi pendidikan untuk menilai secara adil dan benar, sampai dimana kurikulum yang baru berhasil menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang muncul tentang dan mampu membentuk manusia Indonesia yang diinginkan.

Pemaknaan dan posisi Kompetensi Inti K1 dan K2 dalam Kurikulum 2013 seperti di atas, telah memosisikan sikap spritual dan sosial menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki berbagai kekurangan bangsa ini. Namun demikian berkaitan dengan tiga hal pertimbangan untuk mencermati kurikulum baru, hal penting yang dipertanyaan adalah nilai-nilai spritual dan moral manakah yang ingin dikembangkan dalam pendidikan karakter berparadigma kebangsaan dalam Kurikulum 2013? Sehingga akan diketahui secara pasti karakter seperti apa yang ingin dibentuk di Indonesia ini. Sebagaimana dipahami bahwa bangsa Indonesia mempunyai beberapa sumber nilai, yakni nilai agama, budaya, dan nilai Pancasila. Pertanyaan demikian membawa perdebatan pada wilayah etika normatif yakni prinsip dan norma moral spritual manakah yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dalam Kurikulum 2013.

Terhadap masalah ini, sebagaimana penulis bahas sedikit dalam “Reinventing Nillai-Nilai Islam, Budaya, dan Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter”²⁸ terdapat dua madzhab yaitu, madzhab relativisme dan absolutisme. 1) madzhab relativisme, kebenaran moral itu relatif (*moral relativism*). Nilai dianggap benar tergantung dari siapa yang mendefinisikan “*whose defines the values*”.²⁹ Moral baik dan buruk tergantung pada bagaimana individu mendefinisikan. Penganut paham ini berkeyakinan bahwa moralitas bersifat relatif terhadap prinsip tertentu dan menolak bahwa prinsip itu mutlak benar. Relativisme berpandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal. Bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial, maka nilai-nilai yang dianut juga beragam sehingga tidak berlaku adanya kebenaran nilai yang berlaku absolut. 2) Mazdhab absolutisme, kebenaran moral bersifat absolut (*absolute moral*). Mazhab ini sangat percaya bahwa ada standar moral yang berlaku umum dan diakui oleh agama dan budaya yang bersifat *absolute* dan universal, seperti *care* (kasih sayang), *respect* (saling menghormati), *responsible* (bertanggung jawab), *integrity* (integritas), *harmony* (keseimbangan) adalah nilai moral universal yang *absolute* kebenarannya.

²⁸ Baca Mukhibat, “Reinventing Nilai-Nilai Islam, Budaya, dan Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter” *dalam Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Yogyakarta, Vol 1 , No. 2, 2012.

²⁹ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa* (Jakarta: IHF dan BP Migas, 2004), h. 98.

Mazdhab ini juga menganggap moral universal juga bersumber dari agama-agama yang ada yaitu dikenal dengan prinsip *golden rule*.³⁰

Absolutisme moral menghendaki adanya sebuah sumber moral yang menjadi unsur evaluatif atau normatif sebuah perilaku moral. Sumber moral ini pada akhirnya akan menjadi kebaikan ideal yang dijunjung tinggi. Kebaikan ideal inilah yang diusulkan sebagai *core values* pembentukan karakter. Namun yang perlu diperhatikan adalah, bahwa dalam sejarah pendidikan karakter, paham *moral relativism* telah menjadi penyebab utama terjadinya dekadensi moral dan akhlak.³¹

Pertanyaannya kemudian adalah, mazdhab apakah yang dianut, *moral relativism* ataukah *absolute moral* dalam mengembangkan nilai-nilai moral spritual di atas?. Sumber nilai-nilai di atas, secara tidak langsung telah diadopsi sebagai nilai bersama yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013. Namun demikian masuknya nilai-nilai di atas (agama untuk K1, budaya, Pancasila untuk K2) sebagai sumber pendidikan karakter, masih perlu dinyatakan secara jelas berdasarkan mazdhab apa yang dianut.

Mengutip pendapatnya William Kymlika dalam Felix Baghi³² sumber suatu karakter atau jati diri bangsa di manapun umumnya ada tiga yakni asal usul etnis, iman religius dan gagasan mengenai kebaikan bersama. Asal usul etnis dalam hal ini budaya, iman religius dalam hal ini agama dan kebaikan bersama dalam hal ini adalah Pancasila sebagai gagasan sosial politik. Nilai-nilai tersebut diangkat menjadi sumber nilai yang harus dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan nilai-nilai dalam tujuan pendidikan nasional pada hakekatanya adalah nilai-nilai yang diangkat dari ketiga sumber tersebut.

K2 (sikap sosial) dalam Kurikulum 2013 yang bersumber Pancasila sebagai sumber pendidikan karakter, menunjukkan diakuhinya gagasan mengenai *moral absolute* dalam arti nilai yang disepakati dan penting. Nilai tersebut baik secara politis maupun yuridis memang telah menjadi kesepakatan bangsa. Namun demikian nilai-nilai Pancasila itu sendiri secara sosiologis belum tentu dijadikan sebagai sumber dari pendidikan karakter bagi sebagian kelompok masyarakat, mengapa? Nilai-nilai Pancasila menurut penulis menjadi yang paling lemah keberlangsungannya kecuali melalui proses intervensi dengan perangkat hukum dan kebijakan politis

³⁰ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa* h. 99.

³¹ Thomas Lickona, *The Return of Character Education, Jurnal Education Leadership*, Vol 51 No. 3 November 19973, h. 6.

³² Felix Baghi, *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik* (Mauwere: Ledarero, 2009), h. 261.

lainnya.³³ Bangsa Indonesia sudah ber-Pancasila sebelum Indonesia merdeka yakni Pancasila dalam kebudayaan dan Pancasila dalam religius, setelah itu Pancasila dalam Negara atau dikenal dengan istilah Pancasila dalam tri-prakara.³⁴ Oleh karena itu pelaku pendidikan karakter dapat saja mengandalkan sumber nilai lain seperti agama dan budaya.

Adapun sumber nilai untuk K1 (spritual) adalah dari agama. Agama diakui secara luas bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama dan ajaran agama menjadi dasar bagi kehidupan.³⁵ Bahwa moralitas yang berdasarkan agama telah diakui banyak pihak bahkan ada yang secara apriori menyatakan moralitas harus dan tidak bisa tidak berlandaskan pada ajaran agama. Namun demikian hal ini bisa muncul perdebatan, jika moralitas itu berdasarkan ajaran agama, ajaran agama manakah yang dijadikan sebagai pilihan, sementara agama itu sendiri bermacam-macam berikut dengan ajarannya. Masalah ini mungkin tidak menjadi masalah bagi sekolah-sekolah khusus (agama) tetapi bermasalah pada sekolah-sekolah publik. Meskipun nilai moral agama diakui benar dan *absolute* bagi para pemeluknya tetapi belum tentu diakui benar oleh pemeluk agama lain. Jika hal ini terjadi maka moralitas yang bersumber dari agama menjadi hal yang partikular dan relatif.

Antara ketiga sumber nilai, yakni agama, budaya dan gagasan sosial politik Pancasila, bisa dirasakan bahwa nilai ajaran agamalah yang paling kuat menghujam dalam diri seseorang, karena ajaran agama tidak hanya menjangkau masa kini tetapi mampu memberikan keyakinan akan hari kemudian. Hal ini menjadi kelebihan bagi pendidikan karakter yang berbasis nilai agama. Nilai budaya juga tidak bisa diremehkan oleh karena pasti akan muncul para pendukung budaya tertentu yang berusaha dengan gigihnya memasukkannya sebagai isi pendidikan karakter. Nilai tradisi biasanya dipegang teguh oleh para pewaris kebudayaan. Dua sumber nilai ini meskipun dianggap *absolute moral* oleh pendukungnya, namun keberlakuannya secara umum dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia sulit untuk dipaksakan. Secara internal ia bersifat *absolute values*, secara eksternal ia bersifat *relative values*.

³³ UU No 02 Tahun 2011 tentang Parpol pasal 34 ayat 3 huruf b menjadi contoh bahwa nilai moral yang bersumber dari Pancasila adalah lemah, dalam UU tersebut Pancasila ditempatkan sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, posisi Pancasila yang demikian akan menimbulkan kekacauan pemahaman tentang Pancasila dan ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar dan pedoman berbangsa dan bernegara, bukan sebagai bagian dari dasar negara seperti dalam UU tersebut.

³⁴ Notonegoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer* (Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh, 1980), h. 17.

³⁵ Sudarminta, *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif* (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, 1997), h 10.

Manakah yang harus diutamakan dari ketiga nilai tersebut dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing? Thomas Lickona menyatakan negara yang mengakui agama, maka pendidikan moralnya diajarkan melalui pendidikan agama dan sekolah agama, sedang negara yang tidak mengakui agama, pendidikan moralnya diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan (*civics*). Pernyataan ini dapat diartikan bahwa di negara non sekuler nilai moral agama menjadi basis pendidikan karakter, sedangkan di negara-negara sekuler yang umumnya ada di Barat, menggunakan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana bagi pendidikan moral yang sumber nilainya berasal dari gagasan-gagasan sosial politik sekuler yang tidak ada kaitannya dengan agama dan hal itu dilakukan di sekolah publik.³⁶

Pendapat Lickona akan sulit dilakukan di Indonesia tidak mungkin bisa dilakukan karena Indonesia adalah Negara bukan sekuler dan bukan pula Negara agama. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam dari sisi agama dan kebudayaan. Pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan praktis tidak ada masalah jika nilai-nilai moral agama menjadi dasar dalam pendidikan karakter. Lain halnya pada lembaga pendidikan publik (negeri), nilai-nilai apakah yang sesuai yang akan dikembangkan bisa memunculkan problem tersendiri. Motto “Bhineka Tunggal Ika” menuntun pada bangsa Indonesia mengakui identitas kewarganegaraan yang terbedakan (*diferensiated citizenship*) dalam agama dan juga budaya. Namun demikian semua warga masyarakat Indonesia harus mendukung identitas kewarganegaraan nasional (*national citizenship*). Kondisi demikian menjadikan pendidikan karakter harus mampu mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya dan juga nilai Pancasila. Untuk itu kemungkinan terjadinya pertentangan antar berbagai pihak mengenai pilihan nilai bisa saja terjadi. Sejarah panjang bangsa ini telah menunjukkan bahwa Indonesia sering terjadi konflik antara agama dan budaya. Bahkan saat ini masih dijumpai sebagian pemeluk agama dan pewaris budaya tertentu ingin memaksakan suatu nilai untuk diakui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertanyaannya kemudian adalah nilai apa yang seharusnya dikembangkan dalam proses pendidikan sehingga akan menjadi nilai khas bangsa Indonesia dan juga akan melahirkan pendidikan karakter yang berparadigma kebangsaan?. Terhadap masalah tersebut, Doni Koesoema menyarankan agar tidak terjadi pertentangan nilai dalam mengadopsi, sebaiknya pendidik menggunakan nilai sebagaimana yang terdapat dalam

³⁶ Baca, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, *Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia* (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI: 2010), h.6

Pancasila, ideologi negara Indonesia.³⁷ Pancasila diposisikan sebagai materi penting yang dapat dikembangkan dalam pendidikan karakter di samping nilai-nilai yang lain. Sedangkan nilai agama tetap penting dipertahankan, namun tidak dapat dipakai dasar yang kokoh bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Pemahaman demikian bisa saja diterima karena nilai dalam Pancasila diakui sebagai nilai bersama dan tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat.

Bagaimana dengan nilai agama dan budaya? Tentunya semua pemeluk agama dan pewaris budaya tertentu tidak akan menerima apabila agama dan budaya mereka dinegasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa nilai agama dan budaya telah ada dan hidup dalam keyakinan masyarakat Indonesia jauh sebelum Pancasila diletakkan sebagai dasar negara. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama justru semakin berkembang pesat seiring semakin meluasnya dekadensi moral para remaja Indonesia. Orang tua sekarang cenderung mengekologikan anak-anaknya pada lembaga pendidikan agama dengan harapan anaknya akan terbentengi moralnya dari pengaruh negatif dampak globalisasi. Walaupun sebenarnya konsep pendidikan karakter Indonesia telah menempatkan nilai agama dan budaya di samping nilai Pancasila sebagai sumbernya. Bagi sebagian pendukung agama dan budaya tertentu akan mengatakan bahwa nilai moral Pancasila sendiri masih dianggap sebagai nilai yang *absurd* dan multi tafsir. Masih dipertanyakan apakah memang nilai moral Pancasila itu bisa diamalkan. Jika ada, apakah ada metode belajar menurut Pancasila, cara makan menurut Pancasila, dan sebagainya.

Kembali pada permasalahan awal perihal nilai yang dijadikan isi pendidikan karakter apakah dipahami sesuatu yang absolut atau relatif. Kalau dicermati dalam Kurikulum 2013 tampaknya nilai sikap spritual cenderung menempatkan nilai sebagai hal yang absolut, penting, dan perlu diberikan kepada peserta didik. Bagi bangsa Indonesia yang lebih memandang dirinya sebagai masyarakat komunal, nilai memang dipahami sebagai kekuatan spritual dan emosional yang urgen yang mampu menggerakkan kehidupan ini. Nilai bukan semata-mata gejala alamiah, relatif maupun subyektif. Menurut William Kymlicka sebuah masyarakat komunitarian dapat dan seharusnya mendorong orang untuk menerima konsepsi-konsepsi tentang kehidupan yang baik yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakatnya.³⁸ Masyarakat Indonesia bisa menerima

³⁷ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak, di Zaman Global* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 207.

³⁸ Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, terj. Agus Wahyudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 276.

adanya pandangan hidup bersama sebagai sebuah konsep mendasar tentang tentang kehidupan yang baik dalam hal ini Pancasila. Sementara itu pula masyarakat Indonesia bisa menerima pandangan hidup tiap komunitas yang berbeda, dalam hal ini agama dan budaya. Menurut penulis, gejala ini bukanlah *moral relativism* tetapi lebih merupakan pengakuan terhadap adanya pluralitas termasuk pluralitas moral.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana membentuk karakter bangsa yang bersumber dari nilai agama. Sementara dalam banyak kasus manusia dengan latar agama dan budaya yang berbeda dapat menerima nilai-nilai universal yang berasal dari nilai agama tersebut. Pertanyaannya dari manakah kesamaan itu muncul dan bersumber? Esensi suatu agama adalah moral, yaitu moral antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang dengan dirinya sendiri, antara dia dengan orang lain, termasuk masyarakat dengan lingkungannya.

Islam mengenal konsep kesatuan penciptaan, kesatuan penciptaan dapat menjadi referensi yang memunculkan kesamaan, hal ini disebabkan karena semua adalah ciptaan Allah yang Maha Satu. Karena Allah Maha Adil, maka keadilan, kejujuran, toleransi menjadi nilai yang dikembangkan oleh semua agama secara universal. Dalam konteks agama Islam Nama-Nama Terbaik Allah dapat menjadi pondasi *global ethic* dalam pendidikan karakter yang melahirkan figuritas manusia paripurna yang merefleksikan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya.

Pengalaman spritual para sufi dalam Islam telah membawa implikasi kesucian perilaku akhlak dan moral. Karakter sufi adalah turunan dari salah satu ajaran pokok dalam Islam yakni Iman, Islam, dan Ihsan. Ajaran yang ketiga inilah yang dikembangkan untuk melatih pendidikan karakter manusia. Tidak keliru jika dikatakan bahwa filsafat akhlak dalam Islam tumbuh dalam naungan tasawuf dan terbentuk melalui usaha para sufi yang menempuh praktek kesufian dan kemudian menjadi contoh utama akhlak mulia yang merupakan misi kedatangan Islam. Dalam tataran praksis, para sufi dikenal memiliki sifat-sifat baik yang melampaui sekat-sekat agama dan budaya. Bukan hanya kepada manusia, atau sesama muslim saja, kebajikannya menyentuh orang berbeda agama, pelaku dosa, hewan dan tumbuhan. Performa sufi seperti ini sejalan dengan konsep *global ethic* Marvin Berkowitz. Dengan kalimat berbeda dapat ditegaskan, *Asmâ Allâh Al-Husnâ* dapat menjadi dasar pembentukan karakter transenden yang lintas agama dan budaya seperti telah ditunjukkan baik ajaran maupun praktek tasawuf.

E. Kesimpulan

Agenda spiritualisasi pendidikan dalam Kurikulum 2013 begitu penting bagi pembentukan karakter bangsa sekarang ini. Hal ini disebabkan karena munculnya gejala sekularisasi dan hilangnya jati diri bangsa. Generasi bangsa sekarang ini dilanda krisis kemanusiaan secara terus-menerus karena terbelenggu ke dalam pandangan dunia yang revolutif, hedonistik, instan, dan serba materialistik. Keadaan demikian manusia semakin membutuhkan spiritualitas sebagai dasar untuk memberikan jawaban secara lebih komprehensif terhadap krisis kehidupan yang dihadapi.

Spiritualisasi pendidikan sebagai upaya membangun karakter bangsa dalam Kurikulum 2013 dapat dilihat dalam kompetensi inti. Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan/spritual (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4).

Kompetensi Spritual dan Kompetensi Sosial (K1 dan K 2) dalam Kurikulum 2013 akan memberikan *guide line* kepada guru untuk mengajarkan arti pentingnya pendidikan moral dan spritual yang dapat diobyektifikasikan ke dalam proses pendidikan. Adapun sumber nilai spritual yang dapat menjadi pondasi *global ethic* dalam pendidikan karakter adalah dari semua agama yang ada di Indonesia, yakni nilai-nilai universal yang secara eksplisit merujuk pada konsep kesatuan penciptaan, bahwa kesatuan penciptaan dapat memunculkan kesamaan yang disebabkan karena semua adalah ciptaan Allah yang Maha Satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, 2013, *Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Al Attas S.M. Naquib, 1991, *The Consept OF Education In Islam*, ISTAC: Kualalumpur, ISTAC.
- Baghi, Felix, 2009, *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*, Maumere: Ledarero.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2010, *Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI.
- Gulo, Dali, 1982, *Kamus Psychologi*, Bandung: Tonis.
- Hidayat, Komaruddin, 2000, Agama dan Kegagalan Masyarakat Modern, dalam, Nurcholish Madjid et.al, *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern*, Mediacita, Jakarta,
- Hidayatullah, M. Furqon, 2010, *Pendidikan Karakter: Membangun Perdaban Bangsa*, Surakarta: UNS Press.
- Josephson, Michael, 2013, *The Six Pillars of Character*, <http://charactercounts.org/sixpillars.html>.
- Kemendikbud, 2013, *Permendikbud No. 69 Tahun 2003 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, Jakarta: Kemendikbud.
- Koesoema, Doni, 2010, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak, di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo.
- Kymlicka Will, 2004, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lickona, Thomas, "The Return of Character Education", *dalam Jurnal Education Leadership*, Vol 51 No. 3 November 1993.
- Lickona, Thomas, 1991, *Education for Character Education: how Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam.
- Majid, Abdul, Dian Andayani, 2012, *Pendidikan Karakter Persoektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Megawangi, Ratna, 2004, *Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa*, Jakarta: IHF dan BP Migas.

- Mounier, Emmanuel, 1956, *The Karakter of Man*, New York: Harper dan Brathers.
- Notonegoro, 1980, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh.
- Rutlan, Mark, 2009, *Karakter Itu Penting*, terj. Ly Yen, Jakarta: Light Publishing.
- Salim, Ahmad, 2013, *Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah*, Yogyakarta: Sabda Media.
- Samani, Muchlas, Hariyanto, 2013, *Konsep & Model Pendidikan Karakter*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Samsuri, 2009, “Mengapa Perlu Pendidikan Karakter”. *Makalah*, disajikan pada *workshop* tentang Pendidikan Karakter oleh FISE UNY. Yogyakarta tahun.
- Solihah, Ade Irma, “Membentuk Karakter dan Watak Kepribadian”, dalam *Fokus Pengawasan*, tahun VII Triwulan IV: 66, Jakarta: Kementerian Agama RI. No. 28 Tahun 2010.
- Sudarminta, 1997, *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya.
- Sukidi, 2002, *Pendidikan Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: Grasindo.
- Syam, Nur, *Pendidikan Karakter Bangsa*, diunduh dari [www. Suarakarya-online.com.news.html=258714](http://www.Suarakarya-online.com/news.html=258714) pada 3 Maret 2014.
- Synder, C.R., Shane J. Lopez, 2005, *Handbook of Positive Psychology*, Oxford: Oxford University Press.
- Pasiak, Taufiq, 2004, *Revolusi IQ, EQ, SQ Antara Neurosains- dan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, 2007, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: Imperial Bhakti Utama.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2007.
- Widiasto, Tonny D., 2004, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Zubaedi, 2011, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Jakarta: Kencana.

Mukhibat

Zuchdi, Darmiyati, 2008, *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Zurqoni & Mukhibat, 2011, *Menggali Islam Membumikan Pendidikan, Upaya Membuka Wawasan Keislaman & Pemberdayaan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar Ruzzmedia.